



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 21 Maret 2020

Halaman: 14

Komisi Perlindungan Anak Yogya Dikukuhkan

SEBANYAK tujuh komisioner dikukuhkan menjadi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Yogyakarta periode 2020-2022. Mereka diminta membantu mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak, termasuk menangani kekerasan anak dari hulu hingga hilir.

"Masih disayangkan adanya kasus-kasus kekerasan anak. Pemunculan bisa karena kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait kekerasan. Karena kekerasan tidak hanya fisik tapi juga psikis," kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat pengukuhan KPAD Kota Yogyakarta di Balai Kota, Rabu (18/3).

Dia mencontohkan kekerasan psikis seperti hal-hal yang bersifat tidak adil, perlakuan yang tidak nyaman dan pembatasan pe-



Walikota Yogyakarta saat mengukuhkan KPAD Kota Yogyakarta.

ngembangan diri. Dia menjelaskan di tengah perkembangan teknologi, muncul bentuk-bentuk kekerasan baru. Misalnya menye-

barkan foto dan teks ujaran kebencian yang bertujuan mengancam menyakiti korban, tanpa disadari pelakunya.

"Korban kekerasan bukan hanya dipicu dari faktor hilir. Tapi juga perlu memperkuat sekitar hulunya yakni keluarga. Jadi penanganan kekerasan dari sektor hulu hingga hilir," tambahnya.

Menanggapi hal itu Ketua KPAD Kota Yogyakarta, Silvi Dewayani mengatakan, KPAD fokus pada perlindungan dan pengawasan pemenuhan hak-hak anak. Dalam penanganan KPAD bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sudah ada. "Memang ada kasus-kasus kekerasan yang bermula dari hulu keluarga. Dulu keluarga bisa menjadi etem-pati anak tidak lari ke yang lain. Sekarang komunikasi ke anak di keluarga kadang sulit. Makanya kekerasan dan kejahatan jalan masuk isu strategis yang akan kami tangani," jelas Silvi. **(Tri)-o**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005